



LAPORAN PENGELOLAAN RESIKO TRIBUNAN II

2023


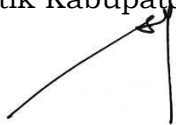
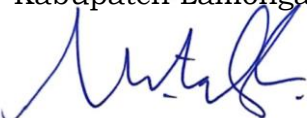
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN LAMONGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Lamongrejo Nomor 92 Lamongan Kode Pos (62217)
Telepon (0322) 321706 E-mail : bakesbangpol@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankab.go.id/bakesbangpol/

NO DOKUMEN	:	
TANGGAL TERBIT	:	2023

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian perencanaan Evaluasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan  SUNARI, S.H, M.Si 19670308 198711 1 001
Diperiksa	:	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan  SUDARMADI, SH.MM 19660926 198703 1 005
Disahkan Oleh	:	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan  DRS. DIANTO HARI WIBOWO, M.IP 19760410 199412 1 002

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumber daya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Risiko selalu timbul dari segala aspek kehidupan dan bersinggungan langsung dengan sosial masyarakat. Informasi dan komunikasi yang memungkinkan masyarakat menjangkau dan berinteraksi secara bebas, tentunya dapat memunculkan delik negatif yang menggerus nilai-nilai sosial dan budaya yang telah disadari dan dipatuhi oleh masyarakat. Keberlanjutan nilai sosial, budaya, dan politik perlu dipertahankan dengan asas gotong royong dan kebersamaan, baik antar masyarakat sendiri maupun antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga terjadi sinergi positif yang dapat meminimalisir ataupun menghilangkan risiko.

Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan menjadi sarana untuk mendapatkan informasi, pelayanan, dan pengetahuan dalam kehidupan bermasyarakat. Program yang direncanakan dan diimplementasikan selalu berkaitan erat dengan kondisi terkini yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini merupakan bentuk komitmen dan konsistensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan sebagai instansi pemerintah yang reaktif dan visioner dalam rangka manajemen risiko.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;

- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan II sebagaimana terlampir pada lampiran 1.1.

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II, yang telah dilaksanakan adalah Peningkatan sistem pengamanan diwilayah, dilakukan mediasi dan koordinasi dengan difasilitasi oleh pihak muspika dan Tim Kewaspadaan Dini Daerah, Melakukan Rapat Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran secara berkala, Melakukan Monev triwulanan, Koordinasi dengan Instansi vertikal/BPKAD, Sosialisasi kepada ASN, dan Koordinasi dengan BPKAD terkait penganggaran sedangkan yang belum dilaksanakan dapat dilihat sebagaimana terlampir pada lampiran 1.2.

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD. Dalam kegiatan pengendalian pengelolaan resiko sosialisasi politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan yang rencana dilaksanakan pada bulan mei tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kegiatan tersebut terbentur dengan kegiatan lain, sehingga dijadwalkan kembali pada tribulan III bulan Juli Tahun 2023.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya. Hal ini disebabkan oleh adanya sinergi yang baik antar pemangku kepentingan, sehingga RTP dapat direalisasikan dengan tepat dan akurat sesuai dengan rancangan pemetaan pemantauan risiko.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II dapat simpulan bahwa resiko dapat dikendalikan dengan tepat dan akurat sesuai dengan rancangan pemetaan pemantauan risiko. Sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan peningkatan kewaspadaan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama di daerah rawan konflik.

LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan II

NO	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:						
1	Peningkatan sistem pengamanan diwilayah dengan 1. Mengedepankan unsur 3 pilar 2. Tertib administrasi kependudukan 3, Tamu wajib lapor 1 x 24 jam 4. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap orang yang tidak dikenal	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penyelesaian Konflik Sosial	Januari-Desember 2023	Setiap Hari	Sudah Trealisasi
2	Dilakukan mediasi dan koordinasi dengan difasilitasi oleh pihak muspika dan Tim Kewaspadaan Dini Daerah	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penyelesaian Konflik Sosial	Setiap ada kejadian konflik sosial	Setiap ada kejadian konflik sosial	Sudah Trealisasi
3	Memaksimalkan peran FPK dalam membangun toleransi masyarakat	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Triwulan III	Juli 2023	Belum Trealisasi
4	Melaksanakan sosialisasi terhadap aliran kepercayaan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Triwulan IV	Oktober 2023	Belum Trealisasi
5	Pembuatan Aplikasi Pendaftaran Ormas	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	Tahun 2023	Tahun 2023	Belum Trealisasi
6	Melaksanakan sosialisasi politik bagi pemula	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	Triwulan II	Mei 2023	Belum Trealisasi
7	Melaksanakan sosialisasi politik bagi pemula	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	Triwulan II	Mei 2023	Belum Trealisasi
8	Melaksanakan sosialisasi politik bagi pemula	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	Triwulan II	Mei 2023	Belum Trealisasi
9	Melaksanakan sosialisasi politik bagi pemula	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	Triwulan II	Mei 2023	Belum Trealisasi

Risiko Operasional OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:						
1	Melakukan Rapat Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran secara berkala	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah dilaksanakan
2	Melakukan Monev triwulanan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Triwulanan	Triwulanan	Sudah dilaksanakan
3	Koordinasi dengan Instansi vertikal / BPKAD	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	BPKAD	Setiap Bulan	Setiap Bulan	Sudah dilaksanakan
4	Koordinasi dengan Inspektorat terkait laporan pertanggungjawaban keuangan yang tepat	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	INSPEKTORAT	Tahun 2023	Tahun 2023	Belum terealisasi
5	Melakukan sosialisasi/bimtek dan pelatihan kepada ASN	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kasubag Umum dan Kepegawaian, BKPSDM	Tahun 2023	Tahun 2023	Belum terealisasi
6	Sosialisasi kepada ASN	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	BKPSDM	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah dilaksanakan
7	Koordinasi dengan BPKAD terkait penganggaran	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	BPKAD	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah dilaksanakan
8	Rekrutment SDM yang memadai	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	BKPSDM dan BPKAD	Tahun 2023	Tahun 2023	Belum terealisasi
9	Koordinasi dengan Aset terkait pengadaan sarana dan prasarana penunjang urusan kantor	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Bidang Aset BPKAD	Tahun 2023	Tahun 2023	Belum terealisasi

Lampiran 1.2 Monitoring Risiko Dan RTP

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaa n RTP	Realisasi Pelaksanaa n RTP	Keterangan
			Tangga l Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:										
1	Majemuknya Potensi Konflik dapat terjadi sewaktu waktu	RSO.23.05.06.01	-	-	-	-	Peningkatan sistem pengamanan diwilayah dengan 1. Mengedepankan unsur 3 pilar 2. Tertib administrasi kependudukan 3, Tamu wajib lapor 1 x 24 jam 4. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap orang yang tidak dikenal	Januari-Desember 2023	Setiap Hari	Sudah Trealisasi
2	Masih ada penyelesaian konflik dengan main hakim sendiri	RSO.23.05.06.02	Pada Hari Senin tanggal 30 Januari 2023	Adanya permasalahan pengeroyokan terhadap Sdr. Muhammad Habib Irsad Bin Sukarno anggota SH Teratai oleh OTK (Orang Tidak Dikenal) di Jl. Raya Gembong-Babat Ds. Gembong Kec. Babat Kab. Lamongan	Aksi Unjuk Rasa oleh Warga PSHT (Pergurua n Silat Setia Hati Teratai)	Bahwa aksi Unras oleh PSHT (Perguruan Silat Setia Hati Teratai) adalah meminta keadilan dari kasus kejadian pengeroyokan oleh Sdr. Muhammad Habib Irsad Bin Sukarno (Anggota PSHT) oleh OTK yang terjadi di Jl. Raya Gembong Babat Kab. Lamongan.	Dilakukan mediasi dan koordinasi dengan difasilitasi oleh pihak muspika dan Tim Kewaspadaan Dini Daerah	Setiap ada kejadian konflik sosial	Setiap ada kejadian konflik sosial	Sudah Trealisasi
3	Masih tertanam faham-faham radikal dan intoleran	RSO.23.05.06.03	-	-	-	-	Memaksimalkan peran FPK dalam membangun toleransi masyarakat	Triwulan III	Juli 2023	Belum Trealisasi

4	Belum terinventarisir secara menyeluruh keberadaan aliran kepercayaan Adanya umat beragama yang masih belum menerima keberadaan penghayat kepercayaan	RSO.23.05.06.04	-	-	-	-	Melaksanakan sosialisasi terhadap aliran kepercayaan	Triwulan IV	Oktober 2023	Belum Trealisasi
5	Belum terinventarisasi keberadaan ormas secara menyeluruh	RSO.23.05.06.05	-	-	-	-	Pembuatan Aplikasi Pendaftaran Ormas	Tahun 2023	Tahun 2023	Belum Trealisasi
6	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi	RSO.23.05.06.06	-	-	-	-	Melaksanakan sosialisasi politik	Triwulan II	Juli 2023	Belum Trealisasi
7	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi pemilihan Presiden dan DPD/DPR/DPRD	RSO.23.05.06.07	-	-	-	-	Melaksanakan sosialisasi politik	Triwulan II	Juli 2023	Belum Trealisasi
8	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi pemilihan Gubernur	RSO.23.05.06.08	-	-	-	-	Melaksanakan sosialisasi politik	Triwulan II	Juli 2023	Belum Trealisasi
9	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi pemilihan Bupati	RSO.23.05.06.09	-	-	-	-	Melaksanakan sosialisasi politik	Triwulan II	Juli 2023	Belum Trealisasi
Risiko Operasional OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:										
1	Kualitas perencanaan kinerja dan anggaran masing-masing kegiatan masih belum optimal	ROO 23.38.5.01	-	-	-	-	Melakukan Rapat Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran secara berkala	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah dilaksanakan
2	Belum optimalnya kualitas laporan dan ketepatan waktu penyampaian Laporan pelaksanaan kegiatan	ROO 23.38.5.02	-	-	-	-	Melakukan Monev triwulanan	Triwulanan	Triwulanan	Sudah dilaksanakan

3	Pencairan anggaran kurang tepat waktu dan tidak maksimal	ROO 23.38.5.03	-	-	-	-	Koordinasi dengan Instansi vertikal / BPKAD	Setiap Bulan	Setiap Bulan	Sudah dilaksanakan
4	Belum optimalnya kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan	ROO 23.38.5.04	-	-	-	-	Koordinasi dengan Inspektorat terkait laporan pertanggungjawaban keuangan yang tepat	Tahun 2023	Tahun 2023	Belum terealisasi
5	Kualitas layanan administrasi kepegawaian masih belum optimal	ROO 23.38.5.05	-	-	-	-	Melakukan sosialisasi/bimtek dan pelatihan kepada ASN	Tahun 2023	Tahun 2023	Belum terealisasi
6	Kualitas layanan administrasi umum masih belum optimal	ROO 23.38.5.06	-	-	-	-	Sosialisasi kepada ASN	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah dilaksanakan
7	Belum terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	ROO 23.38.5.07	-	-	-	-	Koordinasi dengan BPKAD terkait penganggaran	Tahun 2023	Tahun 2023	Sudah dilaksanakan
8	Belum optimalnya kinerja terkait tugas yang telah ditetapkan	ROO 23.38.5.08	-	-	-	-	Rekrutment SDM yang memadai	Tahun 2023	Tahun 2023	Belum terealisasi
9	Sarana dan prasarana kurang memadai	ROO 23.38.5.09	-	-	-	-	Koordinasi dengan Aset terkait pengadaan sarana dan prasarana penunjang urusan kantor	Tahun 2023	Tahun 2023	Belum terealisasi